

---

# KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM KEDARURATAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SUMEDANG

Widiyanti Nur Fatwa

Universitas Sebelas April

---

## Article Info

### Article history:

Received Aug 10, 2024

Revised Des 12, 2024

Accepted Des 12, 2024

---

### Keywords:

*Human Resources Management*

*Employee Performance*

*Disaster Management*

*Disaster Emergencies*

*Forest and Land Fire*

---

## ABSTRACT

*This study aims to identify, process data, analyze, and measure the performance of regional disaster management agencies (BPBD) in forest and land fire disaster emergencies in Sumedang Regency. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive type. The research informants consisted of: Chief Executive, Secretary, Head of the Emergency and Logistics Section, and Operation Logistics Data Center. The data collection technique is literature study, and field study consisting of observation, interview, and documentation. Meanwhile, data processing techniques are data reduction, data display, data conclusion drawing/verification and triangulation. Based on the results of the study, it was concluded that to measure organizational performance in terms of productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability are good. The inhibiting factors lie in individual abilities and the work environment, namely the lack of human resources who are geologists, hydrometologists and other experts, lack of employee concentration and lack of supporting facilities and infrastructure so that efforts are made to improve the work ability of employees through training, adding supporting infrastructure. Suggestions in this study include being more active in conducting socialization, counseling, and simulation to the community, completing the necessary facilities and infrastructure, improving the quality of resources in accordance with the competence of experts in the field of geology, hydrometheologists and other experts.*



Copyright © 2024 JRPA. All rights reserved.

---

## Corresponding Author:

Widiyanti Nur Fatwa

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jln. Angkrek Situ No 19 Kelurahan Situ – Sumedang

Email: [widiyantinfatwa@gmail.com](mailto:widiyantinfatwa@gmail.com)

---

## 1. INTRODUCTION

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang, sedangkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Sumedang mengacu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No 03 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan mengurangi risiko bencana dan memulihkan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah serta menjamin pemenuhan hak masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Sumedang sebagai Kabupaten yang memiliki hutan dan lahan yang luas termasuk kategori daerah yang memiliki potensi bencana alam yang cukup tinggi. Sebagai daerah rawan akan bencana, pemerintah Kabupaten Sumedang menyadari pentingnya penanggulangan bencana. Selain untuk mencegah tingginya korban bencana, penanggulangan bencana juga dapat meminimalisir kerugian materi yang lebih besar, dengan mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam mengantisipasi terjadinya bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi rekonstruksi. Berikut data kebencanaan yang terjadi di kabupaten sumedang pada tahun 2023 direkapitulasi oleh BPBD Kabupaten Sumedang:

**Tabel 1 Data Kebencanaan Tahun 2023**

No	Nama Bencana	Total Kejadian	Keterangan
1	Pohon tumbang	30	Tidak ada korban jiwa dan kerusakan
2	Angin puting beliung	5	Adanya Kerusakan material
3	Longsor	57	Adanya kerusakan material
4	Banjir	7	Tidak adanya korban jiwa dan kerusakan
5	Gempa bumi	1	Tidak ada korban jiwa dan kerusakan
6	Banjir bandang	1	Tidak ada korban jiwa dan kerusakan
7	Pergerakan tanah	3	Tidak ada korban jiwa dan kerusakan
8	Kebakaran hutan dan lahan	127	Adanya kerusakan material

Sumber: Data Kebencanaan BPBD Kabupaten Sumedang

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja BPBD Kabupaten Sumedang tidak hanya menangani penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan saja tetapi menangani berbagai macam bencana alam. Bencana yang paling banyak terjadi pada tahun 2023 yaitu bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sebanyak 127 kejadian di berbagai tempat yang berbeda di Kabupaten Sumedang. Kebakaran hutan dan lahan yang dilanda api mengakibatkan kerusakan serta dampak yang merugikan yang menimbulkan adanya kerusakan dan kerugian material. Seiring terus meningkatnya bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sumedang, maka pihak BPBD Kabupaten Sumedang berkewajiban terus melakukan upaya pencegahan dini, mitigasi bencana, kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan agar tidak meningkat kejadiannya di setiap tahun.

Pemerintah mengandalkan BPBD Kabupaten Sumedang untuk mengantisipasi bencana yang terjadi, karena BPBD Kabupaten Sumedang adalah bagian dari perangkat daerah di bidang penanggulangan bencana. Berikut data kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sumedang dari tahun 2020-2023:

**Tabel 2 Data Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Sumedang Tahun 2020- 2023**

No	Kecamatan	Total Kejadian				Luas lahan/M2 (2023)
		2020	2021	2022	2023	
1	Buahdua	-	-	-	1	20.000
2	Cimalaka	-	-	-	15	47.850
3	Cimanggung	-	-	-	1	1.500
4	Cisarua	-	-	-	4	130.000
5	Cisitu	-	-	-	2	-

No	Kecamatan	Total Kejadian				Luas lahan/M2 (2023)
		2020	2021	2022	2023	
6	Conggeang	-	-	-	1	-
7	Darmaraja	-	-	-	1	-
8	Jatigede	-	-	-	2	10.700
9	Jatinangor	1	-	-	9	5.742
10	Jatinunggal	-	-	-	3	40.000
11	Pamulihan	-	-	-	23	68.750
12	Situraja	1	-	-	1	30.000
13	Sukasari	-	-	-	2	4.700
14	Sumedang Selatan	1	1	-	31	217.082
15	Sumedang Utara	1	-	1	14	18.311
16	Tanjungkerta	-	-	-	2	-
17	Tanjungmedar	-	-	-	1	-
18	Tanjungsari	-	-	-	6	30.700
19	Wado	1	-	-	6	70.500
<b>Total kejadian</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>127</b>	<b>704.835</b>

Sumber: Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang

Berdasarkan data di atas dapat di simpulkan bahwa, bencana kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2020-2022 mengalami penurunan akan tetapi pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang sangat pesat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang merekapitulasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 berjumlah 127 kejadian dan menghabiskan 704.835 luas lahan/M2 yang di picu karena panasnya cuaca musim kemarau dan ada yang memang karena human error (kelalaian manusia) seperti membakar sampah sekitar lahan dan gunung (hutan) tanpa pengawasan yang ketat serta membuang puntung rokok sembarangan. Selain kondisi cuaca dan kelalaian manusia, fenomena El Nino memperpanjang musim kemarau yang sering menyebabkan kebakaran hutan dan lahan pada bulan agustus hingga oktober. El nino mengganggu musim hujan dengan memperlambat sirkulasi angin, menyebabkan keterlambatan musim hujan dan berdampak pada kekeringan yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Melihat besarnya potensi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2023, kabupaten Sumedang saat itu telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan KARHUTLA. Penetapan status siaga darurat bencana di musim kemarau ini, secara resmi telah di tuangkan melalui Keputusan Bupati Sumedang Nomor 297 Tahun 2023 tentang status siaga darurat bencana kekeringan dan KARHUTLA di Kabupaten Sumedang ini akan diberlakukan sampai tanggal 31 Oktober 2023 atau selama masih kemarau.

Perlu usaha yang besar dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang dalam rangka menanggulangi resiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sumedang. Usaha besarnya membutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan.

**Tabel 3 Data Sarana dan Prasarana dalam Penanganan  
Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan**

No	Sarana dan Prasarana	Keterangan
1	Kendaraan roda 4	3
2	Kendaraan roda 2	8
3	Jet nozzle	2
4	Mobil Tangki Air	1
5	Spray Water tank	2
6	Garuk/garpu tanah	Perorangan
7	Tongkat	Perorangan
8	Golok	Perorangan
9	Alkon set dari mulai tangki air	2
10	Selang	2
11	Jet shooter	15

*Sumber: Data BPBD Kabupaten Sumedang*

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa sarana dan prasarana dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan belum optimal di karenakan jika adanya bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam waktu yang bersamaan bisa mencapai 2–4 titik kejadian yang bersamaan di tempat yang berbeda sehingga fasilitas sarana prasana serta sumber daya manusia yang turun ke lapangan terbagi-bagi yang mengakibatkan lambatnya menanggulangi bencana terutama bencana kebakaran hutan dan lahan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang mengingatkan kepada masyarakat untuk senantiasa waspada dan hati-hati terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di musim kemarau. Pihak BPBD telah mengirimkan surat ke kecamatan maupun desa terkait antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan termasuk memasang spanduk peringatan di semua kecamatan. BPBD juga terus mensosialisasikan pada masyarakat untuk membuat sekat bakar terutama di daerah lereng gunung dan bukit yang berbatasan langsung dengan pemukiman warga. Saat suasana musim kemarau sudah mulai dirasakan dan puncaknya diprediksi terjadi pada bulan September dan Oktober. BPBD Sumedang juga saat ini telah memetakan wilayah yang rawan akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yaitu Kecamatan Ungjungaya, Cimanggung, Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Sukasari, Cimalaka, Tanjungkerta serta kawasan sekitar Gunung Tampomas.

Pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berguna untuk membandingkan kinerja suatu organisasi periode lalu dengan periode yang akan datang, sehingga dapat diketahui apakah kinerja mengalami perbaikan atau mengalami penurunan. Hasil evaluasi kinerja yang tertuang dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s/d 100, memperoleh nilai sebesar 77,6111 dengan kategori BB dengan nilai interprestasi sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh kompeten manajemen kinerja yang di evaluasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.

Sedangkan Hasil evaluasi kinerja yang tertuang dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s/d 100 memperoleh nilai sebesar 69,885 dengan kategori B dengan nilai interprestasi baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh kompeten manajemen kinerja yang di evaluasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.

Realisasi kinerja yang kurang dan menurun dari target ini sebagai gambaran kualitas kinerja organisasi dalam kedaruratan bencana yang diberikan masih kurang maksimal, dengan faktor yang menghambat dalam kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang diantaranya Kurangnya sosialisasi, Kurangnya sarana dan prasarana yang di miliki serta keterbatasan sumber daya manusia jika terjadi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di banyak titik kejadian dan kebakarannya begitu luas.

Secara umum kinerja organisasi dapat dilihat dari aspek produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Aspek kinerja tersebut digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang dalam setiap proses penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan dapat dikatakan baik apabila berjalan memenuhi aspek kinerja yang sesuai dengan tugas, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.

Kenyataan yang terjadi di lapangan terkadang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang masih menemui beberapa hambatan yang membuat kerjanya dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan menjadi belum optimal dari beberapa aspek.

Berdasarkan hasil observasi awal yang di lakukan oleh peneliti di peroleh beberapa indikasi masalah yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang, dilihat dari kurangnya kepedulian masyarakat mengenai bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan karena sosialisasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang hanya sekedar mengirimkan surat ke tiap kecamatan dan desa tanpa ditindak lanjuti dengan praktek-praktek yang mendukung dengan kegiatan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik.
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang di miliki oleh BPBD Kabupaten Sumedang salah satunya jet shooter. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik bahwa jet shooter memang tersedia namun belum semua petugas dapat membawa jet shooter kelapangan karena masih terbatas jumlahnya.

3. Keterbatasan sumber daya manusia jika terjadi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di banyak titik kejadian dan kebakarannya begitu luas. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik bahwa BPBD Kabupaten Sumedang harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak lain dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

## 2. METHOD

Mengingat penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah dalam arti apa adanya, maka metode penelitian kualitatif dipandang yang lebih tepat untuk digunakan agar diperoleh data yang lengkap melalui proses wawancara mendalam, observasi, serta kebenaran dan keberadaan dokumen pendukung dari pernyataan para informan (Setiawan, 2018). Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah terkait dengan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sumedang.

Subjek penelitian menurut Ansori (2015: 49-58) mengemukakan bahwa subjek penelitian adalah sumber data utama dalam penelitian yaitu bagian yang mempunyai data yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2018: 218-219) Purposive sampling adalah adalah "Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu". Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah penelitian ini adalah para pelaksana yang dianggap memiliki otoritas, informasi, serta paling tahu apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi situasi yang sedang diteliti. Sehingga Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang di tuangkan pada tabel berikut:

**Tabel 4 Subjek Penelitian**

No	Unsur	Jumlah (Orang)
1	Kepala Pelaksana BPBD kabupaten Sumedang	1
2	Sekretaris BPBD kabupaten Sumedang	1
3	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	1
4	Pusat Data Logistik Operasi (PUSDALOP)	2
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>

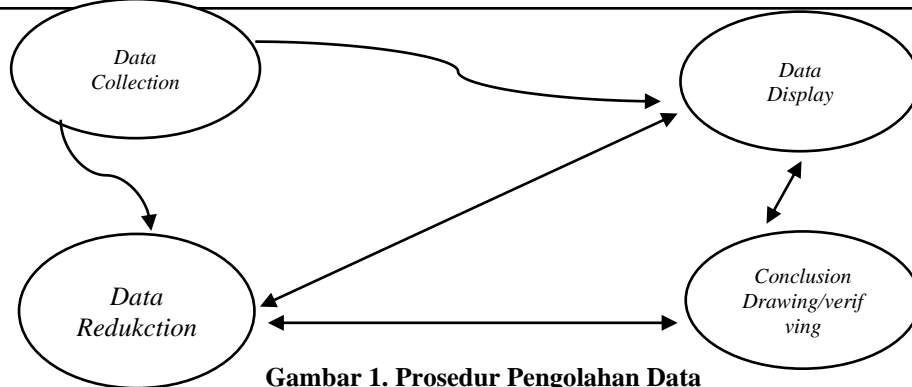
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan teknik pengumpulan data penelitian adalah untuk mendapatkan data. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2018) sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menganalisis beragam literatur baik itu buku-buku ilmiah, dokumen, dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Studi lapangan, yaitu teknik yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian, diantaranya melalui Teknik berikut:
  - a. Observasi.
  - b. Wawancara.
  - c. Dokumentasi.
  - d. Triangulasi.

Pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas
2. Uji Transferabilitas
3. Uji Depenabilitas
4. Uji konfirmabilitas (Sugiyono, 2018)

Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, penelitian melakukan pengelolaan data yang dilakukan dengan mengacu kepada Teknik analisis dan model Miles dan Huberman (Sugiyono 2017) yaitu sebagai berikut



**Gambar 1. Prosedur Pengolahan Data**

Sumber: Sugiyono, 2018

### 3. RESULT AND DISCUSSION

Kinerja organisasi merupakan hasil akhir suatu organisasi yang diukur berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Didalam suatu organisasi tentunya terdapat suatu kinerja organisasi yang dihasilkan oleh pegawai yang berfungsi untuk menjadi acuan pemimpin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Kinerja organisasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam pelayanan publik dalam mencapai visi misi suatu organisasi. Kinerja organisasi juga untuk memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Pencapaian keberhasilan pelayanan publik tersebut agar sesuai dengan saran dan harapan.

Menurut Bastian dan Tangkisan (Aditama dan Widowati, 2017) mengemukakan bahwa: “Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi suatu organisasi tersebut”.

Sedangkan menurut Quansyah dan Nancy (Suryani, 2018) mengemukakan bahwa: “Kinerja Organisasi adalah hasil akhir organisasi yang diukur berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan”.

Pengukuran kinerja suatu organisasi yaitu kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam kedaruratan bencana kebakaran hutan dan lahan berguna untuk membandingkan kinerja suatu organisasi periode lalu dengan periode yang akan datang, sehingga dapat diketahui apakah kinerja mengalami perbaikan atau mengalami penurunan. Kinerja organisasi menentukan tercapai atau tidaknya suatu perencanaan dalam organisasi. Pencapaian tujuan organisasi ini maksudnya adalah mengenai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam kedaruratan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Untuk mengetahui Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam kedaruratan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sumedang, peneliti menggunakan beberapa dimensi untuk mengukur kinerja organisasi publik menurut Agus Dwiyanto (Aditama dan Widowati, 2017: 6-7) yaitu sebagai berikut:

1. Produktivitas
2. Kualitas Layanan
3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas

Apabila dimensi-dimensi diatas terpenuhi, maka Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam kedaruratan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sumedang dikatakan baik dan sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan hasil keseluruhan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam kedaruratan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

**Tabel 5 Kesimpulan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam kedaruratan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sumedang**

No.	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
1.	Produktivitas	a. Efektivitas kerja organisasi	Penanganan bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sudah mulai efektif dan sesuai prosedur, masih ada kekurangan dalam pencapaian sasaran dan tujuan.

No.	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
		b. Efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.	SDM nya sangat minim, akan tetapi mampu melaksanakan tugas dengan beban kerja Sumedang itu daerah rawan bencana 70-80%. Dan memanfaatkan peralatan yang ada dan memanfaatkan anggaran seefisien mungkin untuk penanganan karhutla. Teknis penanggulangan karhutla bisa ditangani bersama dengan baik.
2.	Kualitas Layanan	a. Adanya standar pelayanan yang jelas	Untuk kejelasan standar pelayanan mengenai penanggulangan bencana BPBD melakukan sesuai SOP yang sudah ada dan berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada. Sehingga indikator adanya standar pelayanan yang jelas dikategorikan baik.
		b. Pengetahuan dan Keterampilan pegawai	Ada pelatihan intern dan pelatihan bersama dengan DAMKAR dan relawan yang lainnya, ada juga pelatihan khusus anggota pusdalop.
		c. Evaluasi kegiatan	Untuk pelaksanaan evaluasi kegiatan karhutla di adakan secara berkala yaitu ketika apel dan setelah kejadian karhutla sebagai bahan masukan untuk penanganan karhutla berikutnya.
3.	Responsivitas	a. Kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan	Melakukan beberapa hal yaitu: 1. Pengumpulan data kebutuhan. 2. Usulan kebutuhan dari desa. 3. Laporan langsung dari masyarakat 4. Himbauan kepada masyarakat di daerah rawan bencana. 5. Supervisi ke daerah rawan bencana mengenai kesiapan kemungkinan terjadinya bencana, sehingga dikategorikan sudah baik.
		b. Mengembangkan program pelayanan publik sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat	Dalam pengembangan pelayanan publik BPBD memberikan sosialisasi, himbauan, memberikan informasi kebencanaan di media sosial BPBD Kabupaten Sumedang dan meninjau bagaimana keadaan atau kondisi masing-masing daerah juga pengembangan pelayanan berbasis online melalui aplikasi SITABAH.
		c. Menyusun agenda dan prioritas pelayanan	Agenda atau prioritas pelayanan di BPBD yaitu semua wilayah dan daerah yang termasuk rawan bencana dengan menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat setempat, pembuatan sekat bakar, memberikan surat edaran kepada kepala para camat dan kepala desa.
4.	Responsibilitas	a. Kejelasan kebijakan dan wewenang	Sudah jelas dalam penanggulangan bencana itu mutlak ada 3 yaitu alam, non alam, dan sosial itu tanggungjawab BPBD yang tertuang melalui Keputusan Bupati Sumedang Nomor 297 Tahun 2023 tentang status siaga darurat

No.	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
			bencana kekeringan dan KARHUTLA di Kabupaten Sumedang.
		b. Memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggungjawab	Dalam hal komitmen terhadap tugas yang diberikan BPBD memitigasi dan mengatasi kedaruratan bencana selalu siap siaga selama 24 jam apabila terjadi bencana, dan taklupa untuk merekonstruksi tempat kejadian.
5.	Akuntabilitas	a. Patuh terhadap prosedur yang dibuat	Patuh terhadap prosedur atau aturan dan SOP yang berlaku dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana mengutamakan <i>Safety first</i> keselamatan kerja harus diutamakan.
		b. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan	Sudah bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan yaitu melakukan tugas selama 7 hari 24 jam untuk siap siaga terhadap terjadinya bencana karhutla, dan selalu membuat laporan setiap kali kejadian ke pimpinan.

Sumber: Hasil wawancara di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang, juni 2024

Dari uraian diatas, Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sumedang dikatakan baik, menunjukkan adanya dimensi teori yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik menurut Agus Dwiyanto (Aditama dan Widowati, 2017) sebagai berikut.

Dalam dimensi produktivitas penanganan bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sudah mulai efektif dan sesuai prosedur, masih ada kekurangan dalam pencapaian sasaran dan tujuan dikarenakan untuk mencapai sasaran dan tujuan BPBD Kabupaten Sumedang harus melakukan peningkatan dari berbagai bidang untuk meminimalisir terjadinya bencana karhutla. Pra bencana karhutla dan rekonstruksi pasca bencana karhutla. Namun dilihat dari SDM nya sangat minim, akan tetapi mampu melaksanakan tugas dengan beban kerja Sumedang itu daerah rawan bencana 70-80%. Dan memanfaatkan peralatan yang ada dan memanfaatkan anggaran seefisien mungkin untuk penanganan karhutla. Teknis penanggulangan karhutla bisa ditangani bersama dengan baik.

Pada dimensi kualitas layanan untuk melihat Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sumedang di katakan Baik karena BPBD melakukan layanan sesuai SOP dan berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada. Dalam memberikan layanan para pegawai mendapatkan pelatihan intern dan pelatihan bersama dengan relawan yang lainnya, ada juga pelatihan khusus anggota pusdalop. Kemudian pelaksanaan evaluasi kegiatan karhutla di adakan secara berkala yaitu ketika apel dan setelah kejadian karhutla sebagai bahan masukan untuk penanganan karhutla berikutnya. Kualitas layanan adalah salah satu aspek penting dalam mengukur kinerja organisasi, terutama yang beroperasi di sektor jasa. Kualitas layanan menggambarkan seberapa baik layanan yang diberikan memenuhi atau melebihi harapan masyarakat. Hal tersebut didukung oleh teori menurut Kotler dalam Harahap (2022) mengemukakan bahwa:

Pada dimensi responsivitas untuk melihat Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sumedang di katakan Baik, karena Dalam hal mengenali kebutuhan masyarakat pada prinsipnya BPBD telah memberikan himbauan, sosialisasi, mitigasi bencana mengenai karhutla dan laporan dari masyarakat BPBD tindak lanjuti langsung mengenai bencana kebakaran hutan dan lahan ini. pelayanan publik dalam hal pelayanan data dan informasi kebencanaan yang tertera di aplikasi SITABAH dan media sosial lainnya.

Dilihat dari dimensi tanggungjawab untuk melihat Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sumedang di katakan Baik, karena sudah jelas dalam penanggulangan bencana itu mutlak ada 3 yaitu alam, non alam, dan sosial itu tanggungjawab BPBD yang tertuang melalui Keputusan Bupati Sumedang Nomor 297 Tahun 2023 tentang status siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla di Kabupaten Sumedang.

Dilihat pada dimensi akuntabilitas untuk melihat Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sumedang di katakan Baik,



karena Para pegawai dari BPBD sudah memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap tugasnya dan dapat mematuhi prosedur yang ada di BPBD sesuai dengan SOP yang berlaku.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Sumedang diantaranya ada beberapa hambatan yang terjadi yaitu dalam dimensi kemampuan kerja pegawai secara individu dan hubungan kerja. Dilihat dari dimensi Kemampuan Individu mengingat tidak memiliki tenaga ahli yang khusus dibidang geologi, ahli hidrometeorologi dan ahli lainnya, konsentrasi pegawai yang di sebabkan oleh kurangnya SDM yang tersedia sehingga fokus kerja menjadi terbagi ke beberapa titik kejadian kebakaran, dan kelelahan saat bekerja. Sedangkan dilihat dari dimensi lingkungan pekerjaan Sarana dan prasarana menjadi salah satu penghambat kinerja mengingat kendaraan operasional dan alat pemadam kebakaran kurang memadai untuk penanggulangan karhutla di medan yang sulit menggunakan peralatan yang ada yang sederhana seperti alat sekat bakar. Dari kedua kemampuan faktor tersebut menyebabkan terhambatnya kinerja BPBD kabupaten sumedang dalam penanganan bencana karhutla.

Upaya untuk mengatasi hambatan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam kedaruratan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sumedang yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan yaitu dengan mengikuti setiap pelatihan ataupun pendidikan, sharing tukar pendapat dan pendekatan dengan dinas terkait. Memberikan motivasi yang bersifat membangun, untuk meningkatkan konsentrasi para pegawai. Untuk pemenuhan sarana dan prasarana penunjang BPBD melakukan koordinasi dengan bidang anggaran dan pihak lain untuk melengkapi sarana prasarana untuk penanggulangan bencana karhutla dan agar Hubungan kerja tetap berjalan dengan baik yang utamakan yaitu mempunyai sistem komunikasi yang harus berjalan dengan baik.

#### 4. CONCLUSION

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sumedang sudah baik, dilihat dari dimensi-dimensi pengukuran kinerja organisasi sudah di laksanakan dengan baik karena Penanganan bencana, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di Kabupaten Sumedang menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal efektivitas dan kepatuhan terhadap prosedur, meskipun masih terdapat kekurangan dalam pencapaian sasaran dan tujuan. BPBD Kabupaten Sumedang, meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, berhasil melaksanakan tugas penanggulangan bencana dengan memanfaatkan peralatan yang ada dan mengelola anggaran seefisien mungkin. Pelaksanaan standar pelayanan sesuai SOP, pelatihan yang terus-menerus, serta evaluasi berkala telah meningkatkan kualitas respons. BPBD juga aktif dalam sosialisasi dan pengembangan pelayanan berbasis online melalui aplikasi SITABAH, serta mematuhi aturan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya, memastikan kesiapsiagaan dan keselamatan kerja. Komitmen BPBD untuk siap siaga selama 24 jam dan melaporkan setiap kejadian bencana ke pimpinan mencerminkan dedikasi mereka dalam mitigasi dan penanggulangan karhutla secara menyeluruh.

Faktor-faktor penghambat dalam Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Sumedang diantaranya ada beberapa hambatan yang terjadi yaitu dalam dimensi kemampuan kerja pegawai secara individu dan hubungan kerja. Dilihat dari dimensi Kemampuan Individu mengingat tidak memiliki tenaga ahli yang khusus dibidang geologi, ahli hidrometeorologi dan ahli lainnya, konsentrasi pegawai yang di sebabkan oleh kurangnya SDM yang tersedia sehingga fokus kerja menjadi terbagi ke beberapa titik kejadian kebakaran, dan kelelahan saat bekerja. Sedangkan dilihat dari dimensi lingkungan pekerjaan Sarana dan prasarana menjadi salah satu penghambat kinerja mengingat kendaraan operasional dan alat pemadam kebakaran kurang memadai untuk penanggulangan karhutla di medan yang sulit menggunakan peralatan yang ada yang sederhana seperti alat sekat bakar. Dari kedua kemampuan faktor tersebut menyebabkan terhambatnya kinerja BPBD kabupaten sumedang dalam penanganan bencana karhutla.

Upaya untuk mengatasi hambatan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam kedaruratan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sumedang yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan yaitu dengan mengikuti setiap pelatihan ataupun pendidikan, sharing tukar pendapat dan pendekatan dengan dinas terkait. Memberikan motivasi yang bersifat membangun, untuk meningkatkan konsentrasi para pegawai. Untuk pemenuhan sarana dan prasarana penunjang BPBD melakukan koordinasi dengan bidang anggaran dan pihak lain untuk melengkapi sarana prasarana untuk penanggulangan bencana karhutla dan agar Hubungan kerja tetap berjalan dengan baik yang utamakan yaitu mempunyai sistem komunikasi yang harus berjalan dengan baik.

**REFERENCES**

- Ambarwati. (2018). *Perilaku dan Teori Organisasi*. Malang: MNC.
- Busyra, A. (2022). *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Raja Grafindo Persada .
- Deni, T. (2017). Analisis Kinerja Organisasi Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 6.4.6-13.
- Dwi, H. (2014). Pengukuran Kinerja Organisasi dengan Pendekatan Balanced Scorecard Pada RSUD kabupaten Kebumen. *Jurnal Dinamika Manajemen* , Vol 2 No 1.
- Erika, R. (2020). *Teori Administrasi Publik* . Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Fithriyyah. (2021). *Dasar-dasar Teori Organisasi*. Pekanbaru: IRdev.
- Grifin. (2022). *Customer Loyalty*. Jakarta : Erlangga.
- Harbani, P. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta CV.
- Harits, B. (2021). *Teori Organisasi*. Bandung: CV. Kencana Utama.
- Hermawan, E. (2022). *Buku Monografi Kinerja Organisasi*. Purbalingga : Eurika Media Aksara.
- Jaelani. (2021). *Teori Organisasi*. Semarang : Yayasan Prima Agus Teknik.
- Keban. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu)* . Yogyakarta: Gava Media..
- Ni Kadek, S. (2017). *Kinerja Organisasi* . Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Panjaitan, P. (2021). *Administrasi Publik* . Purbalingga : Eurika Media Aksara .
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta CV.
- Pria Bintang Aditama, N. W. (2017). Analisis Kinerja Organisasi Pada Kantor Kecamatan Blora. *Jurnal Of Public Policy And Manjement* , Review Vol 6 No.2 .
- Robbins, S. (2016). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosvita, V. E. (2023 ). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Indonesia Jurnal Farmasi* , Vol 2.1: 46-52.
- Setiawan, E. (2018). Budaya Organisasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2 (1), 9.
- Silalahi, U. (2020). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo Offset.
- Soehatman. (2011). *Manajemen Bencana*. Dian Rakyat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta .
- Winardi. (2015). *Manajemen Perilaku Organisasi Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.